

**DAMPAK PERPINDAHAN MANAJEMEN SDLB
MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT
KE PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana
Ilmu administrasi negara

OLEH

ROZATI
1405905010121



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Telp (0655) 7023552
MEULABOH, ACEH BARAT
Laman : www.utu.id Email : utu_fisip@yahoo.com Kode Pos 23615

Meulaboh, April 2021

Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenjang Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari

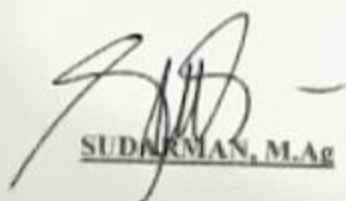
Nama Mahasiswa ROZATI
NIM 1405905010121

Dengan judul
Dampak Perpindahan Manajemen SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh
Barat ke Provinsi Aceh

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh
gelar sarjana S.AP Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku
Umar Meulaboh

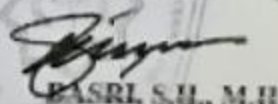
Mengesahkan,

Pembimbing Utama


SUDNEMAN, M.Ag

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


BASRI, S.H., M.H

NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


FADHIL ILHAMSAHIL, S.IP, M.Si

NIDN 00-1710-9101



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH - ACEH BARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: info_utu@yahooinc.com Kode Pos: 23615

Meulaboh, 8 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Pendidikan Tinggi

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Rozati

NIM : 1405905010121

Dengan Judul **DAMPAK PERPINDAHAN MANAJEMEN SDLB MEULABOH
KABUPATEN ACEH BARAT KE PROVINSI ACEH**

Yang telah dipertahankan didepan komisi Ujian pada tanggal

Menyetujui

Komisi Ujian

1. Ketua : Sudarman, M Ag
2. Anggota : Nodi Merefanda M.A.P
3. Anggota : Sri Wahyu Handayani M.A

Tanda Tangan

Mengetahui

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Fadil Ilhamyiah M.Si

NIDN: 0017101101



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rozati

NIM : 1405905010121

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan seperlunya.

Meulaboh, tanggal Bulan Tahun
Yang Menyatakan



Rozati

1405905010121

ABSTRAK

ROZATI. Dampak Perpindahan Manajemen SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat ke Provinsi Aceh. Di bawah bimbingan Sudarman, M.Ag

Pendidikan Luar Biasa atau Sekolah Luar Biasa(SLB) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Dampak Perpindahan Manajemen SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat ke Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan secara *deskriptif kualitatif*. Pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel dengan tujuan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan gabungan dengan teori maka dapat di katakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini terjawab yaitu Dampak positifnya adalah pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam mengelola pendidikan dasar khususnya. Memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Menciptakan pemerataan sumber daya pengajar. Meningkatkan mutu Pendidikan. Terjamin kualitas pendidikan dari masing-masing daerah. Perhatian pemerintah terhadap mutu pendidikan anak kami di SDLB lebih baik. Para guru sekarang lebih aktif dalam membimbing anak-anak kami di SDLB. Kurikulum peajaran SDLB di disesuaikan dengan kurikulum SDL di provinsi aceh yaitu Bada Aceh. Sedangkan dampak negatifnya adalah Terjadinya perbedaan jumlah alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari sebelumnya. Perubahan metode penerimaan siswa baru yang tidak sepenuhnya online ini tidak tersosialisasikan dengan baik oleh provinsi selaku pengelola SDLB, sehingga menimbulkan kesalah pahaman dan kekecewaan dari masyarakat. Penurunan daya tampung sekolah, sebelum 30 siswa untuk setiap Rombongan Belajar (Rombel) diturunkan secara drastis menjadi 20 siswa/Rombel tanpa diiringi penambahan RKB dan USB. Terdapat perbedaan jumlah tunjangan yang cukup jauh bagi guru, sebelum dan sesudah SDLB di kelola Pemerintah Aceh Barat dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

Kata Kunci : Dampak, Perpindahan, Manajemen, SDLB

ABSTRACT

ROZATI. *Impact of the Transfer of Management of SDLB Meulaboh, West Aceh District to Aceh Province. Under the guidance of Sudarman, M.Ag*

Extraordinary Education or Special School (SLB) is education for students who have difficulty in following the learning process due to physical, emotional, mental social disorders, but have the potential for intelligence and special talents. The purpose of this study was to determine the impact of the transfer of management of SDLB Meulaboh, West Aceh District to Aceh Province. This research was conducted in a descriptive qualitative manner. Selection of research informants using purposive sampling technique (sampling with objectives in accordance with the needs of the research being carried out). The number of informants in this study were 7 informants. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on all research results and combined with theory, it can be said that the formulation of the problem in this study was answered, namely the positive impact is that local governments can focus more on managing basic education in particular. Facilitate the provincial government in uniform education management policies. Creating an equal distribution of teaching resources. Improve the quality of education. Guaranteed quality of education from each region. The government's attention to the quality of our children's education in SDLB is better. The teachers are now more active in guiding our children in SDLB. The SDLB teaching curriculum is adjusted to the SDL curriculum in Aceh province, namely Bada Aceh. While the negative impact is the difference in the amount of the allocation of school operational assistance funds (BOS) from the previous one. The change in the admission method for new students, which is not completely online, is not well socialized by the province as the SDLB manager, causing misunderstanding and disappointment from the community. The decrease in school capacity, before 30 students for each study group (Rombel) was drastically reduced to 20 students / Rombel without being accompanied by the addition of RKB and USB. There is a significant difference in the amount of allowances for teachers, before and after SDLB is managed by the Government of West Aceh and the Provincial Government of Aceh.

Keywords: *Impact, Displacement, Management, SDLB*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyusun skripsi ini hingga selesai, Salawat beriring salam kepangkuan Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Skripsi ini berjudul **“Dampak Perpindahan Manajemen SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat ke Provinsi Aceh”**

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan doa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung, membantu, dan memberikan sumbangannya kepada penulis bak moril maupun materil selama pembuatan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua, kakak, adik-adik yang sangat penulis cintai, yang telah memberikan do`anya untuk penulis sehingga berhasil dalam meraih cita-cita dibangku perguruan tinggi
2. Bapak Prof. Dr. Jasman J.Ma`ruf, SE., MBA, selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
3. Bapak Basri, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

4. Bapak Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen FISIP yang telah membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan arti sebuah persahabatan.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan buku maupun kemampuan penulis sendiri dalam mencari dan mengolah data yang ada, maka penulis menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Atas segala bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt dapat membalas semua kebaikannya. Amin.

Alue Peunyareng, Maret 2021

ROZATI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktis.....	4
1.5 Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Dampak.....	9
2.3 Manajemen.....	13
2.4 SDLB.....	15
BAB III. METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Metode Penelitian.....	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.3.1 Sumber Data	23
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.4 Informan Penelitian.....	25
3.5 Instrumen Penelitian.....	25
3.6 Teknik Analisa data.....	26
3.7 Uji Kredibilitas Data.....	26
3.8 Waktu dan Jadwal Penelitian.....	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.2 Hasil Penelitian	36
BAB V. PEMBAHASAN.....	48
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
6.1 Kesimpulan.....	58
6.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah sebuah hak asasi manusia sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak manusia lainnya. Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan investasi masa depan bangsa. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa deskriminasi. Hak pendidikan ini juga berlaku untuk orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat (disabilitas).

Tujuan umum sekolah luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum agar lulusannya memiliki sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja di masyarakat dan dapat menolong dirinya sendiri, serta membanggakan diri sesuai dengan pendidikan seumur hidupnya. Selama ini SLB dianggap sebagai solusi terbaik bagi anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan Luar Biasa atau Sekolah Luar Biasa(SLB) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara lebih tegas dalam UUD NKRI Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta

pemerintah wajib membiayainya. Pasca diterapkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mulai tahun 2016 terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SDLB dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah provinsi. Pemindahan kewenangan yang di amanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, mewajibkan pemerintah kabupaten menyerahkan wewenang pendidikan kepada pemerintah provinsi. Administrasi pengelolaan SMA akan diambil alih pemerintah provinsi. Pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*. Pemindahan kewenangan itu bertujuan untuk memudahkan pemerintah provinsi menyeragamkan kebijakan pengelolaan sekolah. Kebijakan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi pada tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi perubahan status alih kewenangan SMA di Indonesia, yang dahulu pengelolaan SDLB dikelola oleh pemerintah Kabupaten sekarang dialih kelola ke Pemerintah Provinsi. Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus.

Penyerahan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan SLB dari pemerintahan Kabupaten/Kota ke Provinsi Aceh merupakan amanat dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan surat Mendikbud nomor 42359/A5.1/HK2011, diperkuat dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dengan diberlakukannya UU No.23 tahun 2014 ini segala

urusan dan pengelolaan dan manajemen SLB seluruhnya dilimpahkan kepada provinsi baik dari segi sarana dan prasarana maupun anggaran.

Berdasarkan hasil Observasi dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan beberapa guru yang mengajar di sekolah tersebut ada beberapa keluhan yang diutarakan oleh kepala sekolah dan guru yang mengajar di SDLB tersebut terkait perpindahan manajemen pengelolaan SLB dari Kabupaten Aceh Barat ke Provinsi Aceh, banyak keluhan baik dari permasalahan jarak tempuh Aceh Barat ke Banda Aceh yang cukup jauh membuat kepala sekolah merasa kewalahan dalam pengelolaan baik secara kebutuhan sarana dan prasarana maupun administrasi di SDLB ini, bahkan perpindahan manajemen pengelolaan SLB Kabupaten ke Provinsi ini juga berdampak pada ekonomi para guru yang dulunya mereka memiliki TC daerah masing-masing (Tunjangan) dan sekarang telah dicabut oleh daerah karena sepenuhnya telah dialihkan ke Provinsi.

Permasalahan lainnya yang dirasakan salah satunya adalah terjadinya perbedaan jumlah alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari sebelumnya sebesar Rp. 4.140.000/siswa setiap tahun, (yang didalamnya ada pembiayaan dari Pemerintah Aceh Barat sebesar Rp. 2.040.000,- /siswa setiap tahun) menjadi sebesar Rp. 2.100.000,-/siswa setiap tahun. Penurunan alokasi anggaran BOS pada akhirnya dibebankan kepada orang tua siswa, dengan cara menaikkan sumbangan dana pendidikan dari sebesar Rp. 50.000,- /siswa setiap bulan menjadi Rp. 100.000,-/siswa setiap bulan.

Berdasarkan permasalahan perpindahan manajemen pengelolaan penyandang disabilitas di SDLB Meulaboh Aceh Barat diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, apa sajakah dampak dari perpindahan manajemen

pengelolaan SDLB ini apakah berdampak positif atau negatifkah untuk SDLB Meulaboh, serta mempengaruhi pendidikan anak berkebutuhan khusus atau tidak maka dari itu penelitian ini diuraikan oleh penulis dalam proposal skripsi yang berjudul “**Dampak Perpindahan Manajemen Sdlb Meulaboh Kabupaten Ke Provinsi Aceh**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dibahas diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Apa saja dampak positif perpindahan manajemen SDLB dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke Provinsi Aceh di SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat?
2. Apa saja dampak negatif perpindahan manajemen SDLB dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke Provinsi Aceh di SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Seusuai dengan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimanakah dampak positif dan negatif perpindahan manajemen SDLB dari dinas pendidikan Kabupaten Ke provinsi Aceh di SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan serta memperkaya kemampuan berfikir ilmiah dengan sistematis dan metodologi sebagai wacana

baru guna memperkaya aspek konigtif, akademisnya, agar masukan secara langsung untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dampak dari perpindahan manajemen dari Kabupaten ke Provinsi Aceh dalam menunjang pendidikan bagi penyandang disabilitas dan tenaga pengajar yang bersekolah dan bekerja di SDLB Meuaboh Aceh Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada Bab I ini berisikan pendahuluan bab ini membahas mengenai latar belakang masalah mengenai segala pengurusan manajemen SDLB yang dapat meningkatkan kualitas guru dan pendidikan, rumusan masalah pada bab ini yang menjadi rumusan masalah adalah dampak dari perpindahan manajemen SDLB, tujuan penelitian pada bab ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang diteliti, dan manfaat penelitian pada bab ini gunua untuk mendapatkan solusi dari perpindahan manajemen SDLB serta sistematika pembahasan.

Pada bab II ini membahas tinjauan pustaka bab ini membahas mengenai landasan teori sebagai pijakan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan acuan teori-teori yang relevansi dengan hal yang diteliti.

Pada bab III ini membahas metedologi penelitian bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta jadwal penelitian.

Pada bab IV ini menjelaskan hasil penelitian dari dampak perpindahan manajemen SDLB dari Kabupaten ke Provinsi Aceh berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru yang ada di sekolah SDLB tersebut..

Pada bab V ini menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian mengenai perpindahan segala pengurusan manajemen SDLB dari kabupaten ke Provinsi dari hasil pengambilan sample di lapangan.

Pada bab VI ini menjelaskan simpulan dan saran hasil penelitian yang diteliti agar penulis dan pembaca dapat memahami isi dari skripsi yang ditulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Tri Bhrata Yudha dalam judul Pola Komunikasi Antara Guru dan Murid SDLB Meulaboh Tahun 2004 di Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif subyek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah SDLB beberapa guru di SDLB dan beberapa wali murid, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan interview.

Data dianalisis dengan cara menggunakan metode kualitatif, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi antara guru dan murid di SDLB Negeri Meulaboh Aceh Barat sudah terlaksana dengan baik, dan berjalan dengan baik dan guru tidak banyak merasakan hambatan-hambatan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penelliti dari pola komunikasi antara guru dan murid SDLB Meulaboh Aceh Barat, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti yang diharapkan fungsi guru dapat menjadikan perubahan bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) di SDLB Negeri Meulaboh agar anak-anak berkemampuan khusus bisa lebih baik lagi mutu pendidikannya dan juga pendidikan Aceh Barat sebaiknya lebih sering mengadakan pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada guru-guru SDLB untuk memperbaiki kinerja guru atau profesionalisme ketenagakerjaan yang khusus.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah:

- a. **Persamaan** : Persamaan penelitian ini dengan penellitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Bhrata Yudha adalah sama-sama meneliti masalah pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) di SDLB Meulaboh Aceh Barat, serta yang menghambat berkembangnya pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. (ABK).
- b. **Perbedaan** : Penelitian ini lebih kepada Bagaimanakah dampak perubahan manajemen pengelolaan SLB dari dinas pendidikan Kabupaten Ke provinsi Aceh di SDLB Meulaboh. Kabupaten Aceh Barat Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Bhrata Yudha lebih kepada komunikasi antara murid yang disabilitas dengan guru di SDLB Meulaboh Aceh Barat.

Hasil penelitian Erliza Umami dalam judul Analisis Pola Komunikasi Guru Dengan Siswa Tuna Rungu di SDLB Meulaboh Tahun 2013, di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi antara guru dan murid yang tuna rungu di SDLB dan meningkat kan kualitas guru dalam berkomunikasi dengan murid yang tuna rungu, serta untuk meningkatkan pendidikan di SDLB tersebut.

- a. **Persamaan** : Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Erliza Umami adalah sama-sama meneliti tentang masalah pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) di SDLB Negeri Meulaboh, serta yang menghambat berkembangnya pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK).

b. Perbedaan : Penelitian ini lebih kepada Bagaimanakah dampak perubahan manajemen pengelolaan SLB dari dinas pendidikan Kabupaten ke Provinsi Aceh di SDLB Meulaboh. Kabupaten Aceh Barat sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan Erliza Umami adalah lebih fokus kepada pola komunikasi yang dilakukan guru terhadap murid yang tuna rungu.

Hasil penelitian Yusra Rahma dalam judul Strategi komunikasi interpersonal guru kelas autis di SDLB negeri Meulaboh Tahun 2018, di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal guru dan murid yang autis di SDLB dan meningkat kan kualitas guru dalam berkomunikasi dengan murid yang autis, serta untuk meningkatkan pendidikan di SDLB tersebut.

a. Persamaan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Yusra Rahma adalah sama-sama meneliti tentang masalah pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) di SDLB Negeri Meulaboh, serta yang menghambat berkembangnya pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK).

b. Perbedaan : Penelitian ini lebih bagaimanakah dampak perubahan manajemen pengelolaan SLB dari dinas pendidikan Kabupaten ke Provinsi Aceh di SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan Yusra Rahma adalah lebih fokus kepaada strategi interpersonal guru kelas autis dengan murid yang autis .

2.2. Dampak

2.2.1 Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010).

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) merupakan pengaruh yang dapat timbul karena suatu akibat (baik positif atau negatif). Secara ekonomi memiliki makna yakni pengaruh suatu pelaksanaan terhadap kondisi perekonomian di suatu Negara. Dampak merupakan perubahan yang terjadi dilingkungan karena adanya aktifitas manusia (Suratmo, 2004, h.24).

2.2.2 Jenis-jenis Dampak

1. Dampak Sosial

Perubahan yang terjadi pada manusia maupun masyarakat yang diakibatkan karena adanya aktifitas pembangunan di sebut sebagai dampak sosial (Sudharto,1995) adapun dampak sosial yang muncul di sebabkan oleh adanya

aktifitas seperti program, ataupun kebijaksanaan yang di terapkan pada masyarakat. Hal ini tentu dapat memberikan pengaruh pada keseimbangan sistem masyarakat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Perubahan sosial juga merupakan perubahan yang terjadi pada instansi / lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya. Adapun yang termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap serta pola perilaku yang terjadi pada kelompok-kelompok dalam masyarakat (Selo Soemardjan, :1991). Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi karena adanya pergeseran struktur dan organisasi sosial masyarakat.

2. Dampak Ekonomi

Ekonomi berasal dari kata Yunani : *oikos* dan *nomos*. *Oikos* memiliki makna keluarga, rumah tangga dan *nomos* bermakna hukum, peraturan, aturan. Dengan demikian pengertian ekonomi dapat di jelaskan sebagai aturan, hukum yang mengatur tentang hubungan suatu keluarga. Dampak ekonomi adalah pengaruh yang di lakukan manusia yang menimbulkan perbedaan antar manusia sehingga dapat membedakan masyarakat dengan tingkatan yang berbeda-beda mulai dari tingkat ekonomi yang rendah dan ekonomi yang tinggi, dan posisi seorang manusia atau individu dalam kelompok manusia di tentukan dari pendapatan, pendidikan, jabatan, serta jenis rumah yang di tempati, (Abdul Syani:1994)

2.2.3 Teori Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online, 2010) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda)

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Menurut Thomas R. Deye. (dalam Winarno, 2002: 171-173) dampak itu memiliki 2 hal yang dilihat yaitu positif dan negatif.

1. Dampak positif

Dilihat lebih dalam terdapat beberapa dampak positif dari perubahan regulasi ini diantaranya; pertama pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien. Karena adanya pembagian pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi (Dikti), pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah (Dikmen) dan pemerintah kota/kabupaten mengelola pendidikan dasar (Dikdas). Pengelolaan ini selain lebih fokus juga akan lebih efisien dan jika terjadi keberhasilan serta kegagalan pada dunia pendidikan pada tiap jenjangnya akan mudah dideteksi dan mudah di ambil solusinya. Setelah adanya otonomi daerah memang sebagian besar urusan pendidikan lebih banyak dikelola oleh kota/kabupaten, sementara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi hanya sedikit mengelola pendidikan. dengan perubahan pembagian pengelolaan ini diharapkan pengelolaan pendidikan di Indonesia akan lebih adil dan proporsional.

2. Dampak negatif

Dampak negatif dari regulasi baru ini adalah sulitnya mengadakan koordinasi. Koordinasi setingkat kabupaten saja sulit apalagi untuk tingkat provinsi. Karena wilayah pemerintah provinsi lebih luas dari pada wilayah kabupaten. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan birokrasi untuk tidak bekerja maksimal, justru pemerintah provinsi dituntut untuk bekerja lebih baik

melayani dengan pelayanan prima pada sekolah di seluruh kabupaten yang ada di wilayah provinsi. Muncul banyak kekhawatiran masyarakat terkait pemindahan kewenangan sekolah menengah kepada pemerintah provinsi, diantaranya hilangnya kebijakan pendidikan gratis, hilangnya tunjangan guru, serta diberhentikannya beberapa tenaga honorer di daerah. Namun jika dicermati, beberapa hal tersebut masih berupa kekhawatiran. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Menurut Thomas R. Deye. (dalam Winarno, 2002: 171-173) menyatakan dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi.

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah public dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang.

2.3. Manajemen

Secara sederhana, manajemen adalah apa yang dilakukan oleh manajer. Walaupun begitu, pernyataan sederhana tak banyak bercerita kepada kita, penjelasan lebih jauh tentang manajemen adalah proses mengkoordinasi aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Kita telah mengetahui bahwa mengkoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dari posisi non manajerial. Walaupun begitu, ini tidak berarti bahwa manajer dapat melakukan apa yang mereka inginkan setiap saat, di mana saja, atau setiap kesempatan. Selain itu, manajemen melibatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian aktivitas-aktivitas kerja organisasi, atau sekurang-kurangnya itulah yang di dambakan manajer (Stephen P. Robins, 2009, h.8)

(Stephen P. Robins, 2009, h.8) Manajemen juga memfokuskan pada efektifitas menyelesaikan aktivitas-aktivitas sehingga sasaran organisasi dapat tercapai. Efektivitas sering digambarkan sebagai “melakukan pekerjaan yang benar yaitu, aktivitas-aktivitas kerja yang membantu organisasi mencapai sasaran.

Manajemen di fokuskan tidak hanya dengan mencapai kegiatan dan memenuhi sasaran organisasi tetapi juga meakukannya dengan ketidak efisienan mungkin, manajemen yang buruk sering kali merupakan akibat dari ketidakefesienn dan ketidakfisienan atau dari efektivitas yang dicapai melalui ketidakefisienan.

2.3.1 Fungsi Manajemen

Menurut pendekatan fungsi, paran manajer menunjukkan aktivitas atau kewajiban yang jelas ketika mereka secara effesien dan efektif

mengkoordinasikan pekerjaan orang lain. Di abad ke 20, seseorang industryawan Prancis bernama Henry Fayol untuk pertama kalinya mengusulkan bahwa semua manajer melaksanakan lima fungsi: merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Pada pertengahan tahun 1950-an, untuk pertama kalinya sebuah buku ajar manajemen menggunakan fungsi-fungsi merencanakan, mengorganisasi, menyusun staf, mengarahkan, dan mengendalikan sebagai kerangka kerja (Stephen P. Robins, 2009, h.9).

2.3.2 Peran Manajemen

Peran manajemen mengacu pada kategori-kategori tertentu perilaku manajerial. Ada kesepuluh peran manajerial Mintzberg di kelompokkan pada sekitar hubungan antar pribadi, pertukaran informasi, dan pembuatan keputusan.

Peran antar pribadi adalah peran yang melibatkan orang (bawahan dan orang di luar organisasi) dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Tiga peran antar pribadi itu meliputi menjadi seseorang tokoh pemimpin, penghubung. Peran, mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Tiga peran informasional meliputi pemantau, penyebar dan juru bicara. Peran pengambilan keputusan yang berkisar seputar membuat pilihan. Keempat peranan pengambilan keputusan itu meliputi wirausahawan, penyelesai gangguan, pembagi sumber daya dan perunding (Henry Mintzberg dan Stephen P. Robins, 2009, h.10).

Ketika manajer memainkan permainan yang berbeda ini, Mintzberg menyimpulkan bahwa aktifitas kerja mereka yang sebenarnya sehari-hari adalah berinteraksi dengan orang lain, dengan organisasi itu sendiri dan dengan hal-hal di luar organisasi ia juga mengusulkan bahwa aktivitas manajer dalam peranan ini

berada di antara refleksi (pemikiran yang bijaksana) dan tindakan (bertindak praktis).

2.3.3 Pengertian Manajemen Sekolah

Manajemen Sekolah sebagai terjemahan dari *School Management* adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Manajemen Sekolah merubah sistem pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap pihak yang berkepentingan di tingkat lokal (Nanang, 2004, h.11)

Pakar menyatakan, “Manajemen Sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, dengan mendayagunakan segala sumber yang ada dilingkungan sekolah (Didik Prangbakat, 2001, h.3)

2.4. SDLB

Sekolah luar biasa (SLB) (Delphie, 2013, h. 47) merupakan salah satu sekolah anak yang berkebutuhan khusus, yaitu merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa (ALB) yang menandai akan adanya kelainan khusus yang memiliki karakteristik berbeda antara 1 dengan yang lainnya.

Anak berkebutuhan khusus terdiri dari beberapa kategori. Cacat A (Tuna netra) ialah anak dengan gangguan penglihatan, kategori cacat B (Tuna wicara/dan tuna rungu) ialah anak dengan gangguan bicara dan gangguan

pendengaran. Kategori ini di jadikan 1 karena biasanya antara gangguan bicara dan gangguan pendengaran terjadi dalam 1 keadaan atau suatu penyandang, kategori cacat C (Tuna grahita) iyalah anak dengan gangguan intelegensi rendah atau perkembangan kecerdassan yang terganggu, kategori cacat D (Tuna daksa) iyalah anak dengan gangguan pada tulang dan otot yang mengakibatkan terganggunya fungsi motorik, kategori cacat tuna laras adalah anak dengan gangguan tingkah laku sosial yang menyimpang, kategori anak berbakat iyalah anak degan keunggulan dan kemampuan berlebih (IQ tinggi), dengan kategori anak berkesulitan belajar iyalah anak dengan ketidak berfungsi otak minimal (Sumantri, 2012, h.19).

Fungsi sekolah luar biasa itu sendiri memang hanya untuk memmmberikan pengajaran sesuai dengan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus dan tujuannya untuk memberikan sistem pengajaran yang berbeda pada anak normal lainnya dimana anak normal hanya belajar membaca, menulis, berkarya dan berhitung, sedangkan anak-anak berkebutuhan khusus tindakan hanya di ajarkan seperti anak normal, tapi anak berkebutuhan khusus di ajarkan pelajaran khusus sesuai kebutuhannya untuk mempersiapkan para anak berkebutuhan khusus (ABK) melanjuti pendidikan formal dan untuk menjadi pribadi yang mandiri.

2.4.1 Definisi Disabilitas

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBB, 2008, h. 219) penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (Menderita) sesuatu sedangkan disabilitaas merupakan kata bahasa indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa inggris yaitu *disability* yang berarti cacat atau tidak kemampuan .

Menurut Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial pada Bab I Pasal I No 24. Menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, di antaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat, (Eko Riyaldi, 2012, h.293)

2.4.2 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak dengan kebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang secara signifikan bermakna mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, emosional). Dalam proses pertumbuhan/perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dengan demikian, meskipun seorang anak mengalami kelainan/penyimpangan tertentu, tetapi kelainan/penyimpangan tersebut tidak signifikan sehingga mereka tidak memerlukan pelayanan khusus, anak tersebut tidak termasuk anak dengan kebutuhan khusus. (Abdullah, 2006, h.157).

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak

berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barier to learning development*) oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak.

Menurut (Hafielid, 2009, h. 224). Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Konsep anak berkebutuhan khusus (*children with special needs*). Pendidikan kebutuhan khusus (*special needs education*) dan konsep pendidikan luar biasa (*exceptional children*).

Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun yang temporen, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Menurut (Rumanti, 2002,h.49). Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak, disebabkan oleh 3 hal yaitu :

1. Faktor lingkungan.
2. Faktor dalam diri anak sendiri.
3. Kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak sendiri.

Pendidikan luar biasa adalah layanan pendidikan yang bersifat khusus untuk anak penyandang cacat/ketunaan. Kekhususan pendidikan berdasarkan pada tabel kecacatan yang di miliki oleh setiap anak. Anak tuna netra di layani pendidikannya di sekolah khusus untuk tuna netra, demikian juga untuk anak penyandang cacat /ketunaan lainnya setiap jenis sekolah khusus memiliki kurikulum tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dalam konsep pendidikan luar biasa, anak-anak penyandang cacat di kumpulkan satu sekolah yang kualitasnya

adalah tabel kecatatan atau ketunaan. Pendidikan khusus bagi penyandang cacat seperti ini di sebut dengan pendidikan segregatif. (Abdullah,2006,h.21).

2.4.3 Macam-Macam Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

1. Golongan A (Tuna Netra)

Tuna netra adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60. Pengertian tuna netra menurut kamus besar bahasa indonesia adalah tidak dapat melihat (KBBI,2010, h. 229) dan pada umumnya orang mengira tuna netra dengan identik dengan buta, padahal tidaklah demikian tuna netra dapat di klarifikasikan kedalam beberapa kategori tunanetra sebelum dan sejak lahir tuna netra setelah lahir atau pada usia kecil, tuna netra pada usia sekolah atau masa remaja, tuna netra pada usia dewasa atau lanjut usia, tuna netra akibat bawaan.

2. Golongan B (Tuna Rungu)

Tuna rungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran yang bervariasi. Seorang dikatakan tuli (DIF) apabila kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 70 db iso atau lebih, sehingga dia tidak dapat mengerti atau menangkap serta memahami pembicaraan orang lain. Sedangkan seorang dikatakan kurang dengar (*hard of hearing*) bila kehilangan pendengaran pada 35 db iso sehingga dia mengalami kesulitan memahami pembicaraan orang lain melalui pendengarannya baik tanpa maupun dengan alat bantu dengar.

3. Golongan C (Tuna Grahita)

Tuna grahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini di kenal juga retardasi mental (Mental retardation). Retardasi mental adalah kondisi

sebelum usia 18 tahun yang di tandai lemahnya kecerdasan (Biasanya nilai IQ – nya di bawah 70 dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Ciri utama retardasi mental adalah lemahnya fungsi intelektual. Selain intelegensinya rendah anak retardasi mental juga sulit menyesuaikan diri dan berkembang. Sebelum muncul tes formal untuk menilai kecerdasan, orang retardasi mental di anggap sebagai orang yang tidak dapat menguasai keahlian yang sesuai dengan umurnya dan tidak merawat dirinya sendiri.

4. Golongan D (Tuna Daksa)

Anak tuna daksa adalah anak yang mengalami cacat tubuh, anggota gerak tubuh tidak lengkap, bentuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, kemampuan gerak sendi terbatas, ada hambatan dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari.

5. Golongan E (Tuna Laras)

Anak tuna laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrak sosial, menurut definisi dari Eli M. Bower yang menyatakan bahwa anak dengan hambatan emosional kelainan perilaku, apabila menunjukkan adanya 1 atau lebih dari 5 (LIMA) komponen berikut ini : tidak mampu belajar bukan di sebabkan karena faktor intelektual, sensori atau kesehatan, tidak bisa berhubungan baik dengan teman-teman dan guru, tingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi dan bertendensi ke arah symptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah (Dhelfi, 2013, h. 48).

6. Golongan F (Tuna Wicara)

Anak tuna wicara adalah individu yang mengalami kesulitan berbicara di karenakantidak berfungsinya alat-alat organ tubuh seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, dan pita suara. Tuna wicara juga sering disebut bisu, biasanya tuna wicara di ikuti dengan tuna rungu dimana fungsipendengarannya juga tidak dapat berfungsi.

7. Golongan G (Tuna Ganda)

Anak tuna ganda adalah anak ayang memiliki kombinasi kelainan (Baik jua jenis kelainan atau lebih) yang menyebabkan adanya maslaah pendidikan yang serius, sehingga anak tuna ganda tidak hanya dapat di atasi dengan satu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja.

8. Golongan M Autis

Anak autis merupakan kelainan perkembangan sistem saraf padaseseorang yang di alami sejak lahir ataupun saat masa balita dengan gejala menutup diri sendiri secara total, dan tidak berhubungan lagi dengan dunia luar. Merupakan gangguan perkembangan kompleks mempengaruhi prilaku dengan akibat kekurangan kemampuan komunikasi, hbungan sosial dan emosional dengan orang lain.

9. Golongan N Korban penyalah gunaan narkoba

Anak yang mengalami depresi, masalah pribadi atau karena faktor – faktor sekitar yang mendorong anak menggunakan narkoba, sehingga anak terpaksa di rehap utnutk memulihkan kondisi mental dan kesehatan.

10. Golongan O (INDIGO)

Anak indigo adalah istilah yang di gunakan untuk mendeskripsikan anak yang di yakini mempunyai kemampuan atau sifat spesial,tidak biasa dan bahkan supranatural.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2012, h. 6) dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif. Mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah cara peneliti dalam pengumpulan suatu data yang sudah didapatkan.

3.2.1. Sumber Data

Adapun sumber data yang di miliki penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari pihak-pihak yang berkompeten dalam menangani permasalahan terkait judul penelitian ini, data primer dalam penelitian ini di dapatkan dari wawancara secara langsung dengan pihak informan yang dalam hal ini adalah pejabat di dinas pendidikan di meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

b. Data Sekunder

Menurut (Sugiono, 2012, h.141) data sekunder adalah sebagai berikut : “ sumber sekunder adalah sumber data yang di peroleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut (Spradley dalam Sugiono, 2012, h.229). Menyatakan bahwa objek penelitian dalam penelitian kullitatif berupa situasi sosial yang terdiri dai tempat, pelaku, dan aktifitas.

2. Wawancara

Menuru (Moleong, 2012, h.186). Wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang di lakukan leh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan wawancara di harapkan peneliti memperoleh informasi yang lebih memndalam tentang topik yang sedang di teliti, dimana hal ini tidak bisa di temukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiono, 2012, h.240). Menyebutkan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen resmi, sugiono juga menyebutkan bahwa hasil penelitian akan lebih kredibel atau dapat di percaya kalau di dukung dengan data-data yang akurat.

3.2.3 Informasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, unsur yang terpenting ialah seadanya cakupan, keluasan dan kedalaman data yang di peroleh dan beberapa informasi yang di tunjuk. Metode pengambilan informan yang digunakan penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling ialah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu teknik pengambilan sasaran penelitian ini merupakan metode memilih atau menetapkan sasaran penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keabsahan dan kedalaman informasi yang di anggap tau.(Sugiono, 2010, h. 119).

Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Sekolah SDLB Meulaboh	1 Orang
2.	Guru SDLB Meiulaboh	3 Orang
3.	Wali Murid	3 Orang
	Total	7 Orang

3.3. Instrumen Penelitian

Menurut (Suyanto Bagong, 2012, h. 148). Instrumen penelitian adalah Suatu alat yang di gunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati.

Adapun instrumen penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas penelitian baik atau sebaliknya. Adapun penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan cara meneliti terlebih dahulu mencari permasalahan awal, selanjutnya penelitian mengembangkan penelitian dengan menentukan instrumen sederhana, dengan melakukan perbandingan melalui observasi dan wawancara.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses membedah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah di tuangkan dalam bentuk catatan dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya. Dari data tersebut dapat dianalisis mengenai bentuk-bentuk peran dinas pendidikan terhadap menunjangnya pendidikan disabilitas, serta yang menjadi faktor penghambat menunjangnya pendidikan disabilitas di SDLB Meulaboh Aceh Barat.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan kata kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (Miles Matthew Dan Michail Hubertman, 2007). Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarah membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan dan agar di peroleh kesimpulan yang dapat di tarik atau verifikasi. dalam penelitian ini, proses reproduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian di pilih dan di kelompokkan berdasarkan analisis data.

2. Penyajian data

Menurut (Miles Matwin, dan Michail Hubertman, 2009. h. 17-18). penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, data yang telah di kategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan

penyajian data. Data tersebut di sajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti.

3. Ferifikasi data dan penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas (Sugiono, 2012, h. 253).

3.5. Pengujian kredibilitas data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, etekunan dalam penelitian, terianguulasi, diskusi dengan teman sejawat. Pengujian kredibilitas data di gunakan untuk mendapatkan data yang telah mendalam mengenai sunvjek penelitian (Sugiono, 2010, h. 148).

Adapun pengujian data kredibilitas data adalah sebagai berikut Analisis triangulasi merupakan suatu metode analisis atau mengatasi masalah akibat dari kajian mengandalkan satu teori saja. Satu macam data atau suatu metode penelitian saja (Sugiono, 2010, h, 149). Trianguulasi dapat di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara menurut (Sugiono, 2010, h. 150). Terdapat minimal 3 macam triangulasi, yaitu:

1. Trianguulasi sumber data

Pada triangulasi sumber data, data di cek kredibilitas dari berbagai sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama misalnya mengecek sumber data antara bawahan, atau data teman.

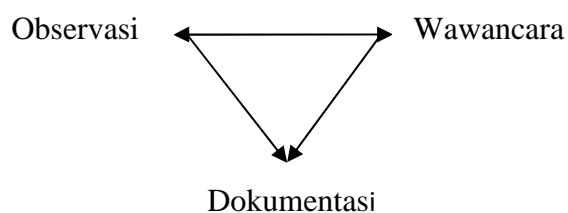
2. Triangulasi teknik pengumpulan data

Pada triangulasi teknik pengumpulan data, data di cek kreadibilitasnya dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama.

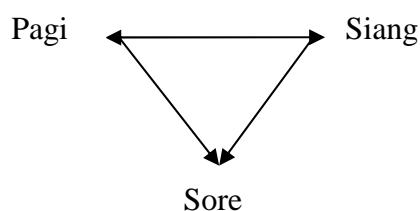
3. Triangulasi pengumpulan data

Pada triangulasi pengumpulan data, data di cek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang sama.

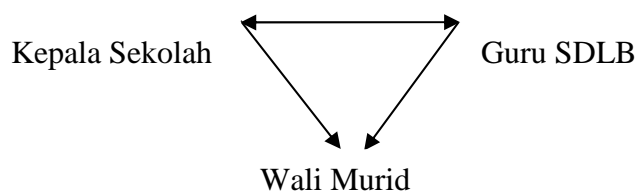
Triangulasi menjadikan data yang di peroleh dalam penelitian menjadi lebih konsisten, tuntas dan pasti srta meningkatkan kekuatan data (Sugiono, 2010, h. 151).



Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



Gambar 3.2 Triangulasi Waktu Pengumpulan Data



Gambar 3.3 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data

3.6 Jadwal penelitian

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Uraian					
		1	2	3	4	5	6
I	Persiapan Penelitian	■	■				
II	Pengumpulan Data Sekunder	■	■				
	Pembuatan Proposal	■	■				
	Seminar Proposal			■			
III	Penelitian Lapangan				■		
	Pengolahan Data				■		
	Analisis Data					■	
IV	Penulisan Laporan					■	
	Seminar Hasil						■
	Sidang Konprehensif						■

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah SDLB Negeri Meulaboh

Sekolah dasar luar biasa Negeri Meulaboh berdiri pada tahun 1982, dan di resmikan pada tahun 1983, dengan kepala sekolah pertama bapak Hamdani. Awal peresmian SDLB Negeri Meulaboh ini belum ada murid untuk mendaftar di sekolah tersebut karena tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan SDLB Meulaboh. Dengan begitu sekolah mengadakan sosialisasi untuk mempromosikan SDLB Negeri Meulaboh. Tahun 1986 baru adanya murid yang mendaftar di sekolah tersebut sampai dengan sekarang ini.

Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Meulaboh ini yang terletak di jalan bakti pemuda Meulaboh, Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat merupakan sekolah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus salah satunya anak autis. Sebagaimana diketahui kehadiran Sekolah Dasar Luar Biasa ini sangat membantu pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus autis. SDLB Negeri Meulaboh ini menyelenggarakan pendidikan sebanyak 6 ketunaan, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna sosial, dan autis. Adapun Visi, Misi, dan Tujuan SDLB Negeri Meulaboh, yaitu:

a. Visi

Terwujudnya pelayanan yang optimal bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat berbangsa serta betaqwa terhadap tuhan yang maha esa.

b. Misi

Misi untuk mewujudkan visi Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Meulaboh di tetapkan sebagai berikut:

1. Memperluas bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang khusus sesuai potensi dan kemampuan yang di miliki.
2. Membentuk moral, pengetahuan dan keterampilan agar peserta didik memiliki bekal keimanan, pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam memasuki kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan manajemen dan kapasitas pengelola dan pembinaan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan Luar Biasa sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dan profesional terhadap peserta didik dan masyarakat.
4. Memperluas jaringan (*networking*) dalam upaya mengembangkan Pendidikan Luar Biasa.

c. Tujuan

Adapun tujuan sekolah SDLB sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan pelaksanaan wajib belajar 6 tahun bagi anak yang bekebutuhan khusus dengan meningkatkan program perluasan kesempatan belajar bagi anak yang berkebutuhan khusus dan berpotensi pada zas pemerataan.
2. Mewujudkan iklim atau suasana bagi kalangan orang tua, anak maupun maysarakat.
3. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.

4. Meningkatkan usaha mutu pendidikan luar biasa melalui pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas guru, peningkatan kualitas guru, peningkatan pembinaan pendidikan luar biasa sesuai dengan kurikulum yang berlaku, penanaman wawasan imtag dan imtek serta pemerataan kelembagaan.

4.1.2 Profil sekolah

A. Data Sekolah

1. Nama Sekolah : SDLB Negeri Meulaboh
2. Niss : 50 10 60 60 10 29
3. Gampong/Desa : Drien Rampak
4. Alamat Sekolah : Johan Pahlawan
5. Status Sekolah : Jln. Bakti Pemuda Meulaboh
6. Klasifikasi Sekolah : (Negeri / Swasta)
7. NPWP Sekolah : 00 401 261 3 103 000

B. Data Kepala Sekolah

1. Nama : Al-Azmi
2. NIP : 1963060319610 0 001
3. Pangkat/Gol Ruangan : Pembina (Iva)
4. NUPIK :
5. Pendidikan Terakhir : D2
6. Status Sertifikasi : Sudah
7. Alamat Tempat Tinggal : GP Lapang

C. Data Tanah Dan Gedung

Tabel 4.1 data tanah dan gedung

No.	Uraian	Jumlah
1	Luas tanah	1.144 m ²
2	Luas bangunan	414 m ²
3	Luas halaman	432 m ²
4	Pagar sekolah	98 mt
5	Status kepemilikan	Pemda
6	Jumlah bangunan sekolah	2 unit
7	Ruang kelas	7 ruang
8	Ruang kepala	1 buah
9	Ruang guru	-
10	Tempat parkir	1 buah
11	Tempat tunggu wali murid	1 buah
12	Sumur bor	1 buah
13	WC	2 buah
14	Ruang UKS	1 buah
15	Gudang	-

D. Keadaan ruang kelas

1. Unit satu

Tabel 4.2 Keadaan ruang unit satu

Unsur Ruang Kelas	Keadaan Saat Ini		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Ventilasi Udara	Baik	-	-
Atap	Baik	-	-
Lantai	Baik	-	-
Dinding	Baik	-	-
Papan tulis		Rusak Ringan	-
Meja siswa	Baik	-	-
Kursi siswa	Baik	-	-
Meja guru		Rusak Ringan	-
Kursi guru	Baik	-	-
Plafon	Baik	-	-

2. Unit dua

Tabel 4.3 Keadaan ruang unit dua

Unsur Ruang Kelas	Keadaan Saat Ini		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Ventilasi Udara	Baik	-	-
Atap	Baik	-	-
Lantai	Baik	-	-
Dinding	Baik	-	-
Papan tulis	Baik	-	-
Meja siswa	Baik	-	-
Kursi siswa	Baik	-	-
Meja guru	Baik	-	-
Kursi guru	Baik	-	-
Plafon	Baik	-	-

3. Unit ketiga

Tabel 4.4 Keadaan ruang unit ketiga

Unsur Ruang Kelas	Keadaan Saat Ini		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Ventilasi Udara	Baik	-	-
Atap	Baik	-	-
Lantai	Baik	-	-
Dinding	-	Rusak Ringan	-
Papan tulis	Baik	-	-
Meja siswa	Baik	-	-
Kursi siswa	Baik	-	-
Meja guru	Baik	-	-
Kursi guru	Baik	-	-
Plafon	Baik	-	-

E. Keadaan Guru dan Murid

Tabel 4.5 Keadaan Guru

No	Nama	L/P	Pangkat	Masa Kerja	NIP/ No Reg Kontrak	Umur (Thn)				S1	
						<40	40-50	51-55	>55	Fakultas	Jurusan
	Jumlah					1	0	0	5		
	I. PNS					1	0	0	5		
1	Hasballah, S.Pd	L	IV/b	34	19650515 198610 1 002				58	Abulyatama	PKN
1	Al-Azmi, S.Pd	L	IV/b	34	19630603 198610 1 001				58	FKIP Almuslim	PGSD
2	Rosmiati, S.Pd	P	IV/b	32	19640310 198610 1 001				57	FKIP Almuslim	PGSD
3	Suryati Budiman, S.Pd	P	IV/b	32	19660112 1988012 002				56	FKIP Almuslim	PGSD
4	Jamaluddin, S.Pd	L	III/C	24	19670705 200701 1 002				55	FKIP Almuslim	PGSD
5	Misran, S.Pd	L	III/a	14	19820715 201403 1 001	39				UPI	Pendidikan Khusus
	II. Non pns					14	0	0	0		
1	Cut Rahmah, S.Pd	P				38				Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang	PLB
2	Erna Vida, S.Pd	P				36				STIKIP Bina Bangsa	PGSD
3	Riza Rahmani, S.Pd	P				30				Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang	PLB
4	Kurnia Fitria, S.Pd	P				33				STIKIP Bina Bangsa	PGSD
5	Dewi Nelly Val, S.Pd	P				28				STAIN Teuku Dirundeng	PAI
6	Jumadi, S.Pd	L				26				STIKIP Bina Bangsa	PGSD
7	Rizki Ramadhana, S.Pd	L				26				FKIP Uninus	PLB
8	Salimah, S.Pd	P				33				Serambi Mekah	Biologi
9	Nurmiati, S.Pd	P				30				FKIP Almuslim	Bahasa Indonesia
10	Desi Ardila, S.Pd	P				26				UPI	Pendidikan Khusus
11	Gema Aulyani, S.Pd	P				27				UPI	Pendidikan Khusus
12	Saiful, S.Pd	L				25				UPI	Pendidikan Khusus
13	Mutia Fahrini Wali, S.Pd	P				25				UPI	Pendidikan Khusus
14	Tri Ariyanza, S.Pd	L				23				FKIP Uninus	PLB

Tabel 4.6 Keadaan Murid

SDLB: Kelas I	SDLB: Kelas II	SDLB: Kelas III
Tuna Netra	Autis	Tuna Grahita
Akila Zahara	Ahmad Yusufadhilah	Cut Al-Masah Rahil Salim
	Aulia Iqbal	Cut Azzaria Salsabila
Tuna Grahita		Indah Dasniati
Mahira	Tuna Rungu	Rahmat Nazwa
Nizam M.Alfariski	Tanzilal anam	Fudhin Alfikarama
Hidayatullah		
Autis	Tuna Netra	
Oktarena Pulung	Jauzaa Aatikah	
Muhammad Fajri		
	Tuna Grahita	
Tuna Daksa	Aisyah Ulyasarah	
SAIFUDDIN	Asdi Niswaatarti	
	Fait Kemal Razzaq	
	Hafizah	

	Jhani Aulia	
	Santa Liangga	
	Ahmad Yusufadillah	
	Stevana Keumala Baqis	
	Wahyu Dinatha	
	Fiona Arsifa Ufairah	
SDLB: Kelas VI	SDLB: Kelas V	SDLB: Kelas IV
Tuna Grahita	Tuna Rungu	Tuna Rungu
Afria Susanti	Abyan Ahmad	Armanita Zuhra
Rahu Syi Syarah	Muhammad Febri Mahendra	Siti Nur Aulia Rahmah
Khairul Umam	Nyak Arifmunandar	Rosna
Sara Nadila	Naisya Bramurni	Riani
Muhammad Rizki Aulia		Sarifa Nur Aini
Rahmad Dirga	Tuna Grahita	Muhammad Saman
	Ijal Maulana	Zulfadli Andi
Tuna Rungu	I T A	Nazlul Afna
Cut Mereta Sari	Farhan Ramadhani	
Muhammad Taqwa	Mumammad Noval	Tuna Grahita
		Cinta Asih Alifia
	Tuna Daksa	Fachrul Razi
	M. Hevan Ahyaly	Lir Ferliani
	Muhammad Abdul Azis	Marvian Pratama
		Zulfachri
	Autis	
	Davit Maulana	
	M. Arfan	

4.2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap permasalahan yang di ambil dalam penelitian ini, menggunakan pedoman wawancara yang disini secara langsung melakukan wawancara secara mendalam, berikut ini hasil penelitian mengenai Dampak Pemindahan Manajemen Pengelolaan SDLB, Dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Ke Provinsi Aceh di SDLB Meulaboh Aceh Barat, pemindahan manajemen

pengelolaan SDLB dari dinas kabupaten aceh barat ke provinsi aceh ini sudah berlangsung selama 1 tahun pada tahun 2017 hingga tahun 2018 selama berpindahya pengelolaan SDLB dri kabupaten ke provinsi banyak kendala serta dampak yang di rasakan para guru dan wali murid dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, serta fisik yang di rasakan adapun dampak-dampak nya adalah dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

4.2.1. Manajemen Pendidikan

1. Manajemen Pendidikan SDLB

Manajemen pendidikan Terealisasinya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah berdampak kepada pengelolaan pendidikan SDLB di Kabupaten Aceh Barat, kewenangan pendidikan SDLB yang sebelumnya menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dikelola oleh pemerintah daerah sebagai daerah otonom untuk menyelenggarakan pendidikan telah diambil alih pemerintah provinsi Aceh khusus nya dalam pendidikan SDLB. Dalam matrix pembagian urusan pemerintah menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan batasan bagi pemerintah pusat, pemeritah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan sub urusan manajemen pendidikan yang diatur dalam pembagian urusan pemerintah. Dalam kaitanya dengan pengelolaan pendidikan sub urusan manajemen pendidikan, Kewenangan Pemerintah Pusat adalah menetapkan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus sedangkan

pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam mengelola pendidikan dasar Paud, formal dan nonformal.

2. Kurikulum

Kurikulum merupakan titik yang paling sentral dalam keberjalanan proses pendidikan. Keinginan untuk dapat mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul terletak pada bagaimana kurikulum itu disusun dan dijalankan Serta didukung dengan kualitas tenaga pendidik sehingga mampu memberikan pengajaran yang dimengerti dan dipahami oleh para siswanya. Dalam undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah terdapat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang mengatur untuk menyusun kurikulum pendidikan. Secara umum penetapan dan standar kurikulum telah diatur dalam permendikbud tentang kurikulum 2013, yaitu Permendikbud No.20 Tahun 2016 Tentang standar Kompetensi Lulusan, Permendikbud No.21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi, Permendikbud No.22 Tentang Standar Proses, Permendikbud No.23 Tentang Standar Penilaian. Sementara batasan dalam menyusun kurikulum menurut Undang-undang No.23 adalah bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam menetapkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kondisi wilayahnya, sedangkan untuk penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Pelaksanaan mengenai status tenaga pendidik dan kependidikan baik guru honorer, guru pns, pegawai tata

usaha honorer ataupun pns yang ada di Aceh Barat pada awal tahun 2017 statusnya sudah menjadi pegawai pemerintah provinsi Aceh. Seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah terdaftar itu menjadi tanggung jawab provinsi. Untuk pegawai yang statusnya sudah menjadi tenaga provinsi maka segala macam kebijakannya harus mengikuti aturan pemerintah provinsi, termasuk dalam hal tunjangan ataupun beban kerja.

Berkaitan dengan tunjangan sendiri terdapat perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh tenaga pendidik dan kependidikan, perbedaan pendapatan itu terjadi dalam hal tunjangan daerah yang diberikan. Seperti pendapatan pokok yang diterima oleh guru yang berstatus pns itu jumlahnya berbedabeda tergantung pangkat dan golongannya, untuk guru pns mendapatkan TPP dari pemerintah provinsi yakni sebesar Rp. 2.000.000/bulan. sedangkan dulu ketika masih dikelola kota guru pns mendapatkan tunjangan daerah yang besarnya sekitar Rp. 3000.000-5.000.000/bulan. Untuk guru honorer yang sudah menjadi tenaga honor provinsi sendiri itu jumlah pendapatan yang diterima sekitar 85.000/jam dan dibatasi paling banyak sebulan itu hanya 10 jam mengajar. Apabila sekolah-sekolah ingin menambah personel pegawai baik itu guru honorer ataupun tenaga tata usaha honorer lainnya maka beban biayanya menjadi tanggung jawab dari sekolah yang bersangkutan tergantung kepada kemampuan dan kebutuhan sekolah tersebut. Sedangkan dalam kaitanya dengan pemindahan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di kota Bekasi hingga saat ini belum dilaksanakan, karena pemerintah provinsi Aceh sendiri masih menginventarisir kebutuhan dan kekurangan pegawai di setiap daerah sehingga dapat mewujudkan pemerataan guru dan pemerataan pendidikan di Aceh.

4. Perizinanam Pendidikan

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan pemerintah dalam menerbitkan perizinan pendidikan yakni Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin perguruan tinggi dan juga satuan pendidikan asing, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus sedangkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin pendidikan dasar, paud, formal dan non formal. Dalam kaitanya dengan implementasi kebijakan pembagian urusan pemerintah jenjang SMA/SMK di Kabupaten Aceh Barat terdapat perubahan dalam hal penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan SDLB dimana sebelumnya kewenangan penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan menengah diberikan oleh pemerintah kota bekasinya namun mulai pada tahun 2017 kewenangan tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam Pelaksanaannya perizinan pendidikan menengah jenjang SDLB sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga dalam menerbitkan surat izin penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat/swasta yang ingin menyelenggarakan pendidikan menengah jenjang SDLB harus melalui pemerintah provinsi Aceh dalam hal ini melalui cabang dinas pendidikan Aceh Barat di kota Meulaboh. Untuk prosedur perizinannya penyelenggaraan pendidikan SDLB bagi masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Kantor Cabang Dinas kota Meulaboh untuk kemudian di tujukan kepada dinas pendidikan provinsi Aceh, setelah dinas pendidikan provinsi Aceh menyetujui, barulah perwakilan Cabang Dinas nantinya akan meninjau kesiapan tempat dan kesiapan suprastruktur

pendukungnya, setelah ditinjau barulah cabang dinas kota Meulaboh akan mengeluarkan surat rekomendasi bagi penyelenggara tersebut. Surat rekomendasi itu nantinya menjadi salah satu persyaratan dalam mengajukan izin ke DPMPSTSP Provinsi Aceh.

4.2.2 Dampak Positif Dari Perpindahan Manajemen Pengelolaan SDLB Dari

Kabupaten Ke Provinsi Aceh

Dampak yang di maksud disini adalah dampak yang bisa mengakibatkan hal positif yang akan di rasakan dari semua kalangan baik sekolah, guru, murid maupun wali murid, jika dampak sosial ini menghasilkan dampak yang positif maka sekolah, guuru, murid dan wali murid akan merasakan efek yang baik dan menguntungkan bagi sekolah, guru, murid, dan wali murid akan mengrasakan efek yang baik. Adapun hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru SDLB Meulaboh Aceh Barat:

Kepala sekolah SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa.

Menurut saya, munculnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat hal ini merupakan kewenangan pemerintah pusat diharapkan dengan munculnya kebijakan ini agar supaya pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam mengelola pendidikan dasar khususnya dan pendidikan menengah dikelola oleh provinsi. Saya rasa hambatan masalah waktu pengurusan berkas ke dinas pendidikan jauh lebih baik, mudah dan cepat dibanding sebelum ada pengalihan. Dan saya harap setelah beralihnya kewenangan urusan pendidikan (SDLB) ke provinsi ini kedepannya bisa lebih memperhatikan lagi sekolah-sekolah SDLB yang berada jauh dari pengawasan pemerintah provinsi, terlebih khusus SDLB kita ini” Pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*.(wawancara 5 desember 2018).

Selanjutnya guru SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Pak Misran menyampaikan bahwa.

Menurut saya dampak positifnya adalah setelah berjalanya undang undang ini pemerataan sumber daya pengajar sangat dibutuhkan, melihat kondisi tenaga pengajar baik di tingkat kabupaten masih belum rata hal ini di mulai dari kepala sekolah hingga tenaga pengajar, maka sangat mungkin mereka berpindah dari kota satu ke kota yang lain.(wawancara 5 desember 2018).

Selanjutnya guru SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Pak Hasballah menyampaikan bahwa.

Menurut saya setelah terealisasi kewenangan ini agar pemerintah provinsi lebih meningkatkan Mutu Pendidikan baik itu melalui tenaga guru dan lebih penting mutu pendidikan untuk siswa SDLB agar para siswa yang jauh dari ibu kota provinsi tidak ketinggalan dengan yang ada di kota. Sebagaimana di ketahui, penerapan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan SDLB dari Pemerintah kabupaten ke provinsi. Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini Paud dan Pendidikan masyarakat Dikmas. Pemerintah daerah diharapkan bisa mengurus ini secara optimal dan maksimal. (wawancara 5 desember 2018).

Selanjutnya guru SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Bu Rosmiati menyampaikan bahwa.

Menurut saya terjamin kualitas pendidikan dari masing-masing daerah Hal ini, di karenakan kondisi saat ini kualitas sekolah SDLB yang berada di Kabupaten tidak semuanya terjangkau sampai ke desa sangat jauh berbeda jauh dengan sekolah yang berada di perkotaan.” (wawancara 5 desember 2018).

Adapun dari wali murid mengatakan bahwa berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB ini dari Kabupaten Aceh Barat ke Provinsi Aceh berdampak positif bagi para guru dan murid yang ada di SDLB ini. Berikut hasil wawancara dengan wali murid yaitu:

“menurut saya dampak positifnya mungkin lebih meningkat nantinya perhatian pemerintah terhadap mutu pendidikan anak kami di SDLB ini ya, karena langsung diawasi oleh pemerintah pusat. Kalau dulu kan oleh

pemrintah daerah Kabupaten Aceh Barat saja, sekarang sudah provinsi pastinya yang terbaik diberikan untuk anak-anak kami (Buk Eva wawancara 5 desember 2018).

“Menurut saya dampak positif yang terlihat dari peralihan tersebut adalah para guru sekarang lebih aktif dalam membimbing anak-anak kami di SDLB karena mereka harus memberikan laporan kerja tentang perkembangan anak-anak kami di SDLB ini ke provinsi dan ini menjadi perhatian penting mereka saat ini. (Buk Suriati wawancara 5 desember 2018).

“Menurut saya dampak positifnya adalah kurikulum peajaran SDLB di sini sekarang diatur oleh pemerintah provinsi pastinya akan disesuaikan dengan kurikulum SDLM di provinsi aceh yaitu Banda Aceh. Ini menurut saya baik bagi kemajuan perkembangan anak-anak kami (Buk maisarah wawancara 5 desember 2018).

Dari dampak positif tersebut di atas pada sekolah, guru, dan wali murid.

Hal ini yang saat di rasakan para guru dan wali murid selama berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB dari dinas Kabupaten, ke Provinsi Aceh saat ini adalah perhatian dan standar pendidikan SDLB di Kabupaten Aceh Barat akan sama dan di sesuaikan dnegan standar pendidikan pada SDLB di kota yaitu Kota Banda Aceh.

4.2.2. Dampak Negatif Dari Perpindahan Manajemen Pengelolaan SDLB Dari Kabupaten Ke Provinsi Aceh

Dampak negatif yang dimaksud disini adalah dampak negatif yang berhubungan dengan anggaran, baik dari segi biaya transportasi, gaji guru, dan dana murid seperti bantuan kurang mampu dan prestasi, jika dampak ekonomi ini menghasilkan dampak yang positif maka segala yang berhubungan dengan anggaran akan merasakan kelebihan dan keuntungan dari berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB dari dinas Kabupaten ke Provinsi Aceh, dan sebaliknya pula apabila dampak ekonomi menghasilkan dampak yang negatif maka segala yang berhubungan dengan anggaran yang ada di SDLB akan

merasakan kelemahan dan kerugian dari berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB dari dinas Kabupaten ke Provinsi Aceh. adapun hasil wawancara guru dan murid di sekolah ini:

Kepala sekolah SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa.

Dampak negatif yang kami rasakan semenjak adanya perpindahan manajemen pengelolaan SDLB KE Provinsi Aceh adalah: 1). Terjadinya perbedaan jumlah alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari sebelumnya sebesar Rp. 4.140.000/siswa setiap tahun, (yang didalamnya ada pembiayaan dari Pemerintah Aceh Barat sebesar Rp. 2.040.000,-/siswa setiap tahun) menjadi sebesar Rp. 2.100.000,-/siswa setiap tahun. Penurunan alokasi anggaran BOS pada akhirnya dibebankan kepada orang tua siswa, dengan cara menaikkan sumbangan dana pendidikan dari sebesar Rp. 50.000,-/siswa setiap bulan menjadi Rp. 100.000,-/siswa setiap bulan. 2). Penerimaan peserta didik baru, sebelum pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah proses penerimaan peserta didik baru 100% dilakukan secara of line. Sedangkan setelah pengalihan pengelolaan pendidikan menengah ke Provinsi yang dilakukan melalui online hanya 60%, sisanya 40% yang melalui jalur off line. Perubahan metode penerimaan siswa baru yang tidak sepenuhnya online ini tidak tersosialisasikan dengan baik oleh provinsi selaku pengelola SDLB, sehingga menimbulkan kesalah pahaman dan kekecewaan dari masyarakat. (wawancara 5 desember 2018).

Selanjutnya Kepala sekolah SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa.

3). Penurunan daya tampung sekolah, sebelum pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan SDLB. Memperhatikan kebutuhan dan animo masyarakat untuk bersekolah pada SDLB, Pemerintah Aceh Barat menetapkan 30 siswa untuk setiap Rombongan Belajar (Rombel) dengan diiringi penambahan RKB dan USB dan pengurangan secara bertahap jumlah siswa untuk setiap Rombel, sehingga kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan SDLB dapat terpenuhi. Setelah pengalihan pengelolaan pendidikan menengah ke Provinsi kebijakan penetapan jumlah siswa/rombel diturunkan secara drastis menjadi 20 siswa/Rombel tanpa diiringi penambahan RKB dan USB. Kondisi ini memunculkan kekecewaan masyarakat. Melihat kondisi ini, untuk melindungi hak masyarakat Aceh Barat dalam mendapatkan pendidikan yang layak Pemerintah Aceh Barat telah meminta pertimbangan kepada Kementerian Pendidikan untuk menambah jumlah siswa/Rombel, dan jawaban atas

permohonan pertimbangan tersebut sebagaimana disampaikan dalam surat Kementerian Pendidikan nomor 31905/A.A4/H/2017, daerah dimungkinkan untuk menambah jumlah siswa/Rombel sampai dengan ketersediaan Ruang Kelas sesuai rasio ideal terpenuhi. 4). Terdapat perbedaan jumlah tunjangan yang cukup jauh bagi guru, sebelum dan sesudah SDLB di kelola Pemerintah Aceh Barat dengan Pemerintah Provinsi Aceh. Perbedaan itu terletak ada nya perbedaan setiap guru SMP, SD negeri berstatus PNS di bawah Pemkot Aceh Barat masih mendapat tunjangan daerah Rp 5,1 juta/bulan. Sedangkan insentif guru SDLB hanya Rp 2 juta dari Pemprov Aceh Barat. Sementara untuk guru honorer dalam satu bulan ketika masih berada di bawah naungan Pemkot Aceh Barat bisa mendapatkan gaji sebesar Rp2,1 juta. Namun kini hanya bisa mendapatkan honor maksimal Rp. 50 ribu sehari. (wawancara 5 desember 2018).

Selanjutnya guru SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Pak Misran menyampaikan bahwa.

Dampak ekonomi pastinya berbicara masalah anggaran, dan tentunya membutuhkan dana untuk mengurus segala keperluan ke provinsi, walaupun dana itu ada dan di tanggung oleh pemerintah apabila dana tersebut belum tersedia kami harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu agar sampai ke provinsi, dan berbicara dampak lingkungan walaupun ada tapi tidak terlalu di raskan oleh para guru dan masih bisa di atasi. Pemerataan guru sangat dibutuhkan mengingat pemerataan tenaga pengajar masih kurang apalagi di perdesaan. Karena perbedaan kualitas Pendidikan di kota dan di desa sangat berbeda karena mengingat fasilitas pendidikan di desa belum memadai dan menunjang seperti tenaga Guru dan fasilitas sekolah yang belum lengkap. Kiranya lewat peralihan SDLB ini pemerintah kabupaten lebih fokus dalam menangani pendidikan (wawancara 5 desember 2018).

Selanjutnya guru SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Pak Hasballah menyampaikan bahwa.

Dampak ekonomi yang di rasakan saat ini selama berpindahnya manajemen dari dinas kabupatean ke provinsi ini sangat di rasakan selaku guru apalagi seperti saya guru honor di sekolah ini, pastinya sangat merasakan dan seperti sering terjadi keterlambatan dalam penerimaan gaji, sudah 2 bulan gaji honorer yang belum masuk,dampak lingkungan saat ini belum ada yang memberatkan dari siegi lingkungan. Yang menjadi kendala menurut saya adalah ketika pengurusan administarasi dan sertifikasi guru menjadi jauh dan sangat memakan waktu serta biaya transportasi ke dinas provinsi dan saya harapkan disetiap kabupaten/kota ada keterwakilannya, supaya disaat pengurusan administrasi dan sertifikasi tidak lagi memakan waktu serta biaya transpostasi yang banyak oleh guru karna jarak yang di tempuh. (wawancara 5 desember 2018).

Selanjutnya guru SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Bu Rosmiati menyampaikan bahwa.

Selaku guru di SDLB ini saya di sini seorang PNS mungkin dari segi ekonomi saya juga merasakan meskipun saya PNS tentunya merasakan dampaknya seperti Tc daerah yang dulunya di dapatkan di Aceh Barat sekarang sudah tidak ada lagi sudah di cabut, karena peraturan yang memindahkan manajemen pengelolaan SDLB ini yang tidak membolehkan lagi kami menerima Tc dari daerah masing-masing lagi, dan dampak lingkungan sampai saat ini masih bisa di atasi dan belum ber efek berat. (wawancara 5 desember 2018).

Adapun dari wali murid mengatakan bahwa berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB ini dari Kabupaten Aceh Barat ke Provinsi Aceh sangat berdampak ekonomi bagi para guru dan murid yang ada di SDLB ini. Berikut hasil wawancara dengan wali murid yaitu:

“menurut saya selaku wali murid di sini tentu saja sangat terasa dampak sosial bagi guru-guru di sini, murid dan kami sebagai wali murid seperti pengurusan SDLB ini kan tidak bisa di urus di sini lagi sudah ke banda, di samping itu Dampak ekonomi berbicara masalah anggaran masuk maupun keluar menurutnya dampak ekonomi dari berpindahnya manajemen ini sangat di rassakan juga bagi kepala sekolah dan guru bahkan bukan hanya mereka yang merasakan dampak tersebut merekapun pun selaku wali murid juga merasakannya dari adanya dana bantuan untuk anak khusus yang dulunya ada kini sudah mulai tak ada lagi, mungkin di karenakan berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB ini ke Provinsi. (Buk Eva wawancara 5 desember 2018).

“menurutnya sama seperti yang di katakan buk eva, tentu guru di sini merasakan jangan kan guru pastinya murid dan mereka selaku wali murid juga merasakan, semenjak di aturnya UUD yang memindahkan manajemen pengelolaan SDLB ke Provinsi, dan dampak ekonomi menurutnya tentu di rasakan oleh para guru di sini karena untuk berangkat ke provinsi untuk memenuhi kebutuhan sekolah juga membutuhkan biaya”. (Buk Suriati wawancara 5 desember 2018).

“menurutnya dampak sosial dari berpindahnya manajemen ini pasti sangat di rasakan oleh kepala sekolah dan guru di sini , karena selaku wali murid dia juga berprofesi sebagai guru sd, menurut saya dampak ekonomi pasti di rasakan kepala sekolah dan guru di sekolah dari berpindahnya manajemen dari Kabupaten ke Provinsi, dan dampak ekonomi meski adanya dana yang di tanggung dari pemerintah untuk sekolah untuk di

gunakan segala keperluan sekolah, tapi apabila sekolah belum menerima dana tersebut otomatis para guru harus menggunakan anggaran pribadi sendiri terlebih dahulu, seperti gaji juga sekarang pasti tentunya tidak ada lagi dari kabupaten pasti sudah di alihkan ke Provinsi(Buk maisarah wawancara 5 desember 2018).

Berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB ini dari Kabupaten Aceh Barat ke Provinsi Aceh sangat berdampak negatif bagi para guru dan murid yang ada di SDLB ini, banyak dampak ekonomi yang negatif yang di rasakan guru-guru dan murid yang bersekolah di SDLB tersebut.

Kesimpulan hasil wawancara yang dengan kepala sekolah adalah sekolah, guru, dan wali murid sudah pasti merasakan dampak berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB dari dinas pendidikan kabupaten ke Provinsi Aceh. Dan banyak dampak yang negatif yang di rassakan oleh mereka baik dampak sosial dan ekonomi.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Manajemen SDLB

Penyerahan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan SLB dari pemerintahan kabupaten/kota ke provinsi Aceh merupakan amanat dari peraturan pemerintah nomor 17/tahun 2010 dan surat Mendikbud nomor 42359/A5.1/HK2011, di perkuat Dengan di berlakukan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dengan di berlakukan UU No.23 tahun 2014 ini segala urusan dan pengelolaan dan manajemen slb seluruhnya di limpahkan kepada provinsi baik dari segi sarana dan prasarana maupun anggaran.

Berdasarkan permasalahan perpindahan manajemen pengelolaan penyandang disabilitas di SDLB Meulaboh Aceh Barat, maka dari perpindahan manajemen pengelolaan sdlb ini menimbulkan beberapa dampak dari dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan, yang berdampak positif atau negatif kah untuk SDLB Meulaboh, serta mempengaruhi pendidikan anak berkebutuhan khusus atau tidak.

Seperti yang kita ketahui dampak sangat mempengaruhi situasi sekolah, guru, murid, maupun wali murid yang ada di SDLB tersebut sehingga semua akan merasakan dampak dari berpindahnya manajemen pengelolaan tersebut baik secara positif maupun negatif, dampak positif dan negatif dari berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB ini akan menguntungkan apabila dampak yang dirasakan positif untuk sekolah dan sekitarnya begitu pula sebaliknya akan merugikan apabila dampak yang di rasakan negatif.

Disamping itu dalam melaksanakan segala proses pendidikan dan pengurusan segala kepentingan sekolah, guru, dan murid SDLB sudah di alihkan ke Provinsi, segala ssesuatu pengurusan akan berjalan dengan lancar apabila semuanya mudah untuk di lakukan dan tidak ada kendala dalam melakukannya kendala yang di maksud dapat berupa dampak yang timbul dari berpindahnya manajemen pengelollan SDLB in dari kabupaten ke Provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian dari informan khususnya kepala sekolah, guru dan wali murid yang ada di SDLB Negeri Meulaboh Kabupaten Aceh Barat ini ada beberapa dampak yang timbul dari berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB dari Kabupaten ke Provinsi Aceh antara lain sebagai berikut:

5.2. Dampak Perpindahan Manajemen SDLB dari Dinas Kabupaten ke Provinsi

5.2.1 Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik.

Dari dampak positif pada sekolah, guru, dan wali murid. Hal ini yang saat di rasakan para guru dan wali murid selama berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB dari dinas Kabupaten, ke Provinsi Aceh saat ini adalah perhatian dan standar pendidikan SDLB di Kabupaten Aceh Barat akan sama dan di sesuaikan dnegan standar pendidikan pada SDLB di kota yaitu Kota Banda Aceh.

Masalah waktu pengurusan berkas ke dinas pendidikan jauh lebih baik, mudah dan cepat dibanding sebelum ada pengalihan. Dan saya harap setelah beralihnya kewenangan urusan pendidikan (SDLB) ke provinsi ini kedepannya bisa lebih memperhatikan lagi sekolah-sekolah SDLB yang berada jauh dari pengawasan pemerintah provinsi, terlebih khusus SDLB kita ini” Pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*. Dampak positifnya adalah setelah berjalanya undang undang ini pemerataan sumber daya pengajar sangat dibutuhkan, melihat kondisi tenaga pengajar baik di tingkat kabupaten masih belum rata hal ini di mulai dari kepala sekolah hingga tenaga pengajar, maka sangat mungkin mereka berpindah dari kota satu ke kota yang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat di jelaskan bahwa dampak positif perpindahan manajemen SDLB dari Dinas Kabupaten ke Dinas Provinsi yaitu:

1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat hal ini merupakan kewenangan pemerintah pusat diharapkan dengan munculnya kebijakan ini agar supaya pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam mengelola pendidikan dasar khususnya dan pendidikan menengah dikelola oleh provinsi.
2. Kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan

diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*.

3. Undang undang ini menciptakan pemerataan sumber daya pengajar sangat dibutuhkan, melihat kondisi tenaga pengajar baik di tingkat kabupaten masih belum rata hal ini di mulai dari kepala sekolah hingga tenaga pengajar, maka sangat mungkin mereka berpindah dari kota satu ke kota yang lain
4. Pemerintah provinsi lebih meningkatkan Mutu Pendidikan baik itu melalui tenaga guru dan lebih penting mutu pendidikan untuk siswa SDLB agar para siswa yang jauh dari ibu kota provinsi tidak ketinggalan dengan yang ada di kota.
5. Terjamin kualitas pendidikan dari masing-masing daerah Hal ini, di karenakan kondisi saat ini kualitas sekolah SDLB yang berada di Kabupaten tidak semuanya terjangkau sampai ke desa sangat jauh berbeda jauh dengan sekolah yang berada di perkotaan
6. Perhatian pemerintah terhadap mutu pendidikan anak kami di SDLB ini ya, karena langsung diawasi oleh pemerintah pusat. Kalau dulu kan oleh pemrintah daerah Kabupaten Aceh Barat saja, sekarang sudah provinsi pastinya yang terbaik diberikan untuk anak-anak kami
7. Para guru sekarang lebih aktif dalam membimbing anak-anak kami di SDLB karena mereka harus memberikan laporan kerja tentang perkembangan anak-anak kami di SDLB ini ke provinsi dan ini menjadi perhatian penting merka saat ini.

8. Kurikulum peajaran SDLB di sini sekarangkan diatur oleh pemerintah provinsi pastinya akan disesuaikan dengan kurikulum SDLM di provinsi aceh yaitu Bada Aceh. Ini menurut saya baik bagi kemajuan perkembangan anak-anak kami

5.2.2 Dampak Negatif

Dampak negatif adalah dampak negatif yang berhubungan dengan anggaran, baik dari segi biaya transportasi, gaji guru, dan dana murid seperti bantuan kurang mampu dan prestasi, jika dampak ekonomi ini menghasilkan dampak yang positif maka segala yang berhubungan dengan anggaran akan merasakan kelebihan dan keuntungan dari berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB dari dinas Kabupaten ke Provinsi Aceh, dan sebaliknya pula apabila dampak ekonomi menghasilkan dampak yang negatif maka segala yang berhubungan dengan apa yang dirasakan guru dan orang tua siswa.

Kesimpulan hasil wawancara yang dengan kepala sekolah adalah sekolah, guru, dan wali murid sudah pasti merasakan dampak berpindahnya manajemen pengelolaan SDLB dari dinas pendidikan kabupaten ke Provinsi Aceh. Dan banyak dampak yang negatif yang di rasakan oleh mereka baik dampak sosial dan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat di jelaskan bahwa dampak negatif perpindahan manajemen SDLB dari Dinas Kabupaten ke Dinas Provinsi yaitu:

1. Terjadinya perbedaan jumlah alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari sebelumnya sebesar Rp. 4.140.000/siswa setiap tahun, (yang didalamnya ada pembiayaan dari Pemerintah Aceh Barat sebesar Rp. 2.040.000,- /siswa setiap tahun) menjadi sebesar Rp. 2.100.000,- /siswa setiap tahun. Penurunan alokasi anggaran BOS pada akhirnya dibebankan kepada orang tua siswa, dengan cara menaikkan sumbangan dana pendidikan dari sebesar Rp. 50.000,- /siswa setiap bulan menjadi Rp. 100.000,-/siswa setiap bulan.
2. Penerimaan peserta didik baru, sebelum pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah proses penerimaan peserta didik baru 100% dilakukan secara of line. Sedangkan setelah pengalihan pengelolaan pendidikan menengah ke Provinsi yang dilakukan melalui online hanya 60%, sisanya 40% yang melalui jalur off line. Perubahan metode penerimaan siswa baru yang tidak sepenuhnya online ini tidak tersosialisasikan dengan baik oleh provinsi selaku pengelola SDLB, sehingga menimbulkan kesalah pahaman dan kekecewaan dari masyarakat.
3. Penurunan daya tampung sekolah, sebelum pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan SDLB. Memperhatikan kebutuhan dan animo masyarakat untuk bersekolah pada SDLB, Pemerintah Aceh Barat menetapkan 30 siswa untuk setiap Rombongan Belajar (Rombel) dengan diiringi penambahan RKB dan USB dan pengurangan secara bertahap jumlah siswa untuk setiap Rombel, sehingga kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan SDLB dapat terpenuhi.

Setelah pengalihan pengelolaan pendidikan menengah ke Provinsi kebijakan penetapan jumlah siswa/rombel diturunkan secara drastis menjadi 20 siswa/Rombel tanpa diiringi penambahan RKB dan USB. Kondisi ini memunculkan kekecewaan masyarakat. Melihat kondisi ini, untuk melindungi hak masyarakat Aceh Barat dalam mendapatkan pendidikan yang layak Pemerintah Aceh Barat telah meminta pertimbangan kepada Kementerian Pendidikan untuk menambah jumlah siswa/Rombel, dan jawaban atas permohonan pertimbangan tersebut sebagaimana disampaikan dalam surat Kementerian Pendidikan nomor 31905/A.A4/H/2017, daerah dimungkinkan untuk menambah jumlah siswa/Rombel sampai dengan ketersediaan Ruang Kelas sesuai rasio ideal terpenuhi.

4. Terdapat perbedaan jumlah tunjangan yang cukup jauh bagi guru, sebelum dan sesudah SDLB di kelola Pemerintah Aceh Barat dengan Pemerintah Provinsi Aceh. Perbedaan itu terletak ada nya perbedaan setiap guru SMP, SD negeri berstatus PNS di bawah Pemkot Aceh Barat masih mendapat tunjangan daerah Rp 5,1 juta/bulan. Sedangkan insentif guru SDLB hanya Rp 2 juta dari Pemprov Aceh Barat. Sementara untuk guru honorer dalam satu bulan ketika masih berada di bawah naungan Pemkot Aceh Barat bisa mendapatkan gaji sebesar Rp2,1 juta. Namun kini hanya bisa mendapatkan honor maksimal Rp. 50 ribu sehari.

5.3 Kaitan Hasil penelitian dengan Teori yang digunakan

Dari keseluruhan hasil wawancara diatas, jika dihubungkan dengan teori yang penulis gunakan yakni teori dampak menurut Thomas R. Deye. (dalam Winarno, 2002: 171-173) dampak itu memiliki 2 hal yang dilihat yaitu positif dan negatif.

1. Dampak Positif

Dampak positif adalah segala sesuatu dampak dari kebijakan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi yang dirasakan oleh semua pihak.

Dalam hal ini dampak positif yang di dapat dari perpindahan manajemen SDLB dari Dinas Kabupaten ke Provinsi adalah Menyebabkan pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam mengelola pendidikan dasar khususnya. Memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*. Menciptakan pemerataan sumber daya pengajar di mulai dari kepala sekolah hingga tenaga pengajar, maka sangat mungkin mereka berpindah dari kota satu ke kota yang lain. Mutu Pendidikan baik itu melalui tenaga guru dan lebih penting mutu pendidikan untuk siswa SDLB agar para siswa yang jauh dari ibu kota provinsi tidak ketinggalan dengan yang ada di kota. Terjamin kualitas pendidikan dari masing-masing daerah. Perhatian pemerintah terhadap mutu pendidikan anak kami di SDLB lebih baik. Para guru sekarang lebih aktif dalam membimbing anak-anak kami di SDLB. Kurikulum peajaran SDLB di sini sekarang diatur oleh pemerintah provinsi pastinya akan disesuaikan dengan kurikulum SDL di

provinsi aceh yaitu Bada Aceh. Ini menurut saya baik bagi kemajuan perkembangan anak-anak kami

2. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah segala sesuatu dampak dari kebijakan yang membawa perubahan ke arah yang lebih buruk atau menurun yang dirasakan oleh semua pihak

Dalam hal ini dampak negatif yang di dapat dari perpindahan manajemen SDLB dari Dinas Kabupaten ke Provinsi adalah Terjadinya perbedaan jumlah alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari sebelumnya. Perubahan metode penerimaan siswa baru yang tidak sepenuhnya online ini tidak tersosialisasikan dengan baik oleh provinsi selaku pengelola SDLB, sehingga menimbulkan kesalah pahaman dan kekecewaan dari masyarakat. Penurunan daya tampung sekolah, sebelum 30 siswa untuk setiap Rombongan Belajar (Rombel) diturunkan secara drastis menjadi 20 siswa/Rombel tanpa diiringi penambahan RKB dan USB. Terdapat perbedaan jumlah tunjangan yang cukup jauh bagi guru, sebelum dan sesudah SDLB di kelola Pemerintah Aceh Barat dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan gabungan dengan teori maka dapat di katakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini terjawab yaitu Apa saja dampak perpindahan manajemen SDLB dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke Provinsi Aceh di SDLB Meulaboh Kabupaten Aceh Barat adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam mengelola pendidikan dasar khususnya. Memudahkan pemerintah

provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Menciptakan pemerataan sumber daya pengajar. Meningkatkan mutu Pendidikan. Terjamin kualitas pendidikan dari masing-masing daerah. Perhatian pemerintah terhadap mutu pendidikan anak kami di SDLB lebih baik. Para guru sekarang lebih aktif dalam membimbing anak-anak kami di SDLB. Kurikulum peajaran SDLB di disesuaikan dengan kurikulum SDL di provinsi aceh yaitu Bada Aceh. Sedangkan dampak negatifnya adalah Terjadinya perbedaan jumlah alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari sebelumnya. Perubahan metode penerimaan siswa baru yang tidak sepenuhnya online ini tidak tersosialisasikan dengan baik oleh provinsi selaku pengelola SDLB, sehingga menimbulkan kesalah pahaman dan kekecewaan dari masyarakat. Penurunan daya tampung sekolah, sebelum 30 siswa untuk setiap Rombongan Belajar (Rombel) diturunkan secara drastis menjadi 20 siswa/Rombel tanpa diiringi penambahan RKB dan USB. Terdapat perbedaan jumlah tunjangan yang cukup jauh bagi guru, sebelum dan sesudah SDLB di kelola Pemerintah Aceh Barat dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di bahas pada bab sebelumnya maka kesimpulan mengenai dampak perpindahan manajemen dari SDLB meulaboh ke Provinsi Aceh adalah:

1. Dampak positifnya adalah pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam mengelola pendidikan dasar khususnya. Memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Menciptakan pemerataan sumber daya pengajar. Meningkatkan mutu Pendidikan. Terjamin kualitas pendidikan dari masing-masing daerah. Perhatian pemerintah terhadap mutu pendidikan anak kami di SDLB lebih baik. Para guru sekarang lebih aktif dalam membimbing anak-anak kami di SDLB. Kurikulum peajaran SDLB di disesuaikan dengan kurikulum SDL di provinsi aceh yaitu Bada Aceh.
2. Dampak negatifnya adalah Terjadinya perbedaan jumlah alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari sebelumnya. Perubahan metode penerimaan siswa baru yang tidak sepenuhnya online ini tidak tersosialisasikan dengan baik oleh provinsi selaku pengelola SDLB, sehingga menimbulkan kesalahan pahaman dan kekecewaan dari masyarakat. Penurunan daya tampung sekolah, sebelum 30 siswa untuk setiap Rombongan Belajar (Rombel) diturunkan secara drastis menjadi 20 siswa/Rombel tanpa diiringi penambahan RKB dan USB. Terdapat perbedaan jumlah tunjangan yang cukup jauh bagi guru, sebelum dan

sesudah SDLB di kelola Pemerintah Aceh Barat dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

6.2 Saran

1. Di harapkan kepada pemerintah pusat, untuk membuat suatu cabang lembaga di tiap-tiap daerah yang ada sekolah yang telah di alihkan ke Provinsi seperti salah satu contohnya SDLB ini sehingga meringankan sistem kerja para guru yang ada di SDLB ini sehingga tidak menimbulkan dampak bagi sekolah, guru, dan murid yang ada di SDLB ini.
2. Di harapkan kepada pemerintah pusat, agar memperhatikan semua sekolah, guru dan wali murid yang telah di alihkan ke Provinsi, seperti dari segi anggaran dan sistem kerja agar tidak ada keluhan dampak yang ada.
3. Membuat suatu sistem yang mempermudah bukan mempersulit semua kalangan apabila peraturan pengalihan manajemen tersebut mempersulit akan ada baiknya menciptakan peraturan baru dan mencabut peraturan lama.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dampak Positif

- a. Apa pendapat anda mengenai undang-undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang perpindahan manajemen pengurusan SDLB ke Provinsi?
- b. Apasaja perubahan positif dari segi administrasi yang terjadi?
- c. Apasaja perubahan positif dari segi pendidikan yang terjadi?
- d. Apasaja perubahan positif dari segi pendapatan bagi guru yang terjadi?
- e. Apa saja kemudahan yang didapatkan semenjak perpindahan manajemen tersebut yang ada menurut anda?
- f. Apakah pengalihan ini memiliki dampak yang baik bagi perkembangan sekolah SDLB?

2. Dampak Negatif

- a. Apasaja perubahan negatif dari segi administrasi yang terjadi?
- b. Apasaja perubahan negatif dari segi pendidikan yang terjadi?
- c. Apasaja perubahan negatif dari segi pendapatan bagi guru yang terjadi?
- d. Apa saja kendala yang didapatkan semenjak perpindahan manajemen tersebut yang ada menurut anda?
- e. Apakah pengalihan ini memiliki dampak yang negatif bagi perkembangan sekolah SDLB?
- f. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif trsebut menurut anda?

